

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan ridho-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana

Penyusunan Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) adalah merupakan penjabaran DPA SKPD dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023.

Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) berisi materi rencana strategis, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi, tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) tahun 2023 ini diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.

Mataram,      Maret 2022

Kepala Dinas,  
Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

**I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670320 198903 1013

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita Bangsa dan Negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembanan dan penerapan sitem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban menyusun Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) Tahun 2023 sebagai landasan dan pedoman operasional pelaksanaan kegiatan program-program tahun 2023.

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II</b> <b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB III</b> <b>TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>39</b>
<b>BAB IV</b> <b>RENCANA KERJADAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>41</b>
<b>BAB V</b> <b>DANA PENUTUP</b> .....	<b>79</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka setiap SKPD wajib merumuskan rencana setrategis dengan mengacu pada RPJMD dan dengan mempertimbangkan kondisi dan isu strategis masing-masing wilayah. Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman perencanaan 5 (lima) tahun yang mempunyai fungsi sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan, dan sebagai acuan dan pedoman penyusunan RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah sebagai dokumen operasional tahunan di Disnakertrans Prov. NTB. Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan pembangunan.

Rencana Kerja/Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023. Untuk mendapatkan keselarasan antara RENJA/RKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Sehubungan dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 yang mengacu kepada Rancangan awal RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022, Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan dokumen perencanaan lainnya.

Untuk penjabaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, maka dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi dan berkesinambungan proses penyusunan perencanaan pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan, maka diperlukan RENJA/RKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 yang merupakan pelaksanaan tahun ke-5 RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

RENJA SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Arah kebijakan, Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RENJA/RKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen RENSTRA Tahun 2019-2023.

RENJA/RKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 juga merupakan sebagai bahan untuk penyusunan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS), penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKA) dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, RENSTRA Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, RKP Tahun 2022, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 dan dokumen lain yang terkait yang pada akhirnya menjadi muara penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun yang bersangkutan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD, RPJMD Dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan sebagai acuan dan alat koordinasi

dan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 1(satu) tahun.

Tujuannya adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan sebagai Kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD Tahun Anggaran 2022.
2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dengan RKPD Provinsi NTB Tahun 2021;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi urusan melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan pelayanan publik dengan pola Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah.

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Bab ini berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

##### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja merupakan telaah terhadap hasil evaluasi pencapaian target kinerja program/kegiatan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja, setelah selesai pelaksanaan dilakukan evaluasi/*review* agar pelaksanaan tahun mendatang dapat diidentifikasi realisasi program/kegiatan yang memenuhi atau melampaui target dan yang tidak memenuhi target serta kendala - kendala yang dihadapi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB telah menetapkan Perjanjian Kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Gubernur NTB dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

*Tabel 2.1.*  
*Target dan Realisasi Sasaran Staregis, Indikator Kinerja*  
*Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2021*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Persentase Penyerapan Angkatan Kerja	96,70	96,99	100,30
2	Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis/kondusif	Presentase Perusahaan yang harmonis/kondusif	98,77	98,97	100,20
3.	Meningkatnya Transmigran yang ditempatkan dan dibina	Persentase transmigran yang ditempatkan dan dibina	97,57	97,57	100

Dari Tabel 2.1, Sasaran Strategis 1 (satu) Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat melebihi target dari target 96.70 persen dengan realisasi 96,99 persen, capaian ini sejalan dengan turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB. Hal ini menggambarkan



meningkatnya penempatan tenaga kerja baik pada sektor formal maupun informal serta kompetensi tenaga kerja yang dilatih sudah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dunia industri.

Pada Sasaran Strategis 2 (dua) Dalam rangka Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis/kondusif dapat diukur dengan indikator persentase perusahaan yang harmonis/kondusif. Pada tahun 2021 persentase perusahaan yang harmonis/kondusif ditargetkan sebesar 98,77 persen dengan realisasi 98,97 persen, capaian sudah melebihi target yang sudah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tahun 2020 Disnakertrans Prov. NTB (berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006), terdapat program prioritas dalam rangka mencapai tujuan perangkat daerah yaitu Tercapainya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Program tersebut adalah Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, dengan realisasinya pada Tabel 2.2.

*Tabel 2.2.*  
*Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2021*

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2021			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Porsentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	90	%	300.351.716	0	0	63	46.616.300	63	35.481.400	100	76.11	63	35.481.400	70	11.81
1.1	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan	2	dokumen	300.351.716	0	0	2	46.616.300	2	35.481.400	100	76.11	2	35.481.400	70	11.81
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	18	%	3.481.991.780	0	0	16	464.055.900	17.89	340.123.600	111.83	73.29	17.89	340.123.600	99.38	9.76
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (Induk)	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	750	Orang	1.092.070.447	0	0	25	243.550.200	18	139.264.200	72.00	57.18	18	139.264.200	2.4	2.75

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2021			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7
2.2.	Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai	100	Lembaga	147.454.000	0	0	25	23.454.000	25	23.434.000	100	99.91	25	23.454.000	25	15.91
2.3.	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (BLK)	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	384	orang	2.044.288.965	0	0	32	168.575.900	32	160.937.800	100	95.47	32	160.937.800	8.3	7.87
2.4	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)	55	OT	92.804.380	0	0	15	28.475.800	15	16.487.600	100	57.90	15	16.487.800	27.27	17.77
2	<b>Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja</b>	<b>Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan %</b>	<b>57.48</b>	<b>%</b>	<b>3.391.251.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.71</b>	<b>696.946.230</b>	<b>47.58</b>	<b>614.163.200</b>	<b>106.42</b>	<b>88.12</b>	<b>47.58</b>	<b>614.163.200</b>	<b>82.77</b>	<b>18.11</b>
3.1.	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten / Kota	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL	480	Orang	910.699.800	0	0	40	85.276.600	40	85.215.600	100	99.93	40	85.215.600	8.33	9.36

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2021			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
3.2.	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	5.250	Orang	388.974.000	0	0	1.500	85.957.800	0	49.460.500	0	57.54	0	49.460.500	0	12.72
3.3.	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	76.010	Orang	1.995.499.514	0	0	22.731	523.633.200	1.629	477.418.900	51.82	91.17	1.629	477.418.900	2.14	23.92
3.4	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	95	orang	96.078.630	0	0	20	2.078.630	20	2.068.200	100	99.50	20	2.068.200	21.05	2.15
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.	Besaran sengketa pengusaha pekerja %	23	%	1.025.630.908	0	0	21	192.995.600	15.94	186.002.400	75.91	96.38	15.94	186.002.400	69.30	18.13

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2021			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
4.1	Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi]	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	270	Perusahaan	743.997.600	0	0	60	130.999.200	60	130.939.200	100	99.95	60	130.939.200	22.22	17.60
4.2	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK)	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan	11	%	281.633.308	0	0	11	61.996.400	11	55.063.200	100	88.82	11	55.063.200	100	19.55

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2021			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
	Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK)																
4.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan.	Besaran pemeriksaan Perusahaan	23	%	3.466.483.655	0	0	21	807.970.000	21.49	725.768.600	102.33	89.83	21.49	725.768.600	93.43	20.93
5.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	3.175	Perusahaan	3.466.483.655	0	0	367	807.970.000	367	725.768.600	100	89.83	367	725.768.600	11.55	20.94
5	Program Perencanaan Kawasan transmigrasi	Persentase Kawasan baru transmigrasi	100	%	280.462.183	0	0	100	91.653.100	100	61.462.840	100	67.06	100	61.462.840	100	21.91
5.1	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen NKSAD.	1	dokumen	280.462.183	0	0	1	91.653.100	100	61.462.840	100	67.06	100	61.462.840	100	21.91

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD s.d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2021			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			<b>5</b>		<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8=(7/6)*100</b>		<b>9=5+7</b>		<b>10=(9/4)*100</b>	
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase satuan permukiman yang mandiri	100	%	229.134.751	0	0	97.87									
	Kegiatan Pengembangan satuan Pemukiman pada tahap pemantapan	Jumlah peserta Bimtek	60	orang	229.134.751	0	0	30	53.007.660	30	51.704.430	100	97.54	30	51.704.430	50	22.57

Adanya Revisi Renstra Disnakertrans Prov NTB Tahun 2019-2023, Program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Gubernur NTB dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

*Tabel 2.3.  
Target dan Realisasi sasaran staregis, indikator kinerja  
Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2021*

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Persentase Penyerapan Angkatan Kerja	96,70	96,99
2	Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis/kondusif	Presentase Perusahaan yang harmonis/kondusif	98,77	98,97
3	Meningkatnya Transmigran yang ditempatkan dan dibina	Persentase transmigran yang ditempatkan dan dibina	97,57	97,57

Sesuai dengan Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 penyusunan program/kegiatan mengalami perubahan, sebelumnya Permendagri 13 berubah menjadi Permendagri 90. Dalam mencapai tujuan perangkat daerah, Disnakertrans di dukung oleh 8 program prioritas antara lain : Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Program Hubungan Industrial dan Program Pengawasan Ketenagakerjaan. Berikut Rencana Program dan Kegiatan seperti pada Tabel 2.4.



Tabel 2.4.  
Perkiraan Hasil Pelaksanaan Renja dan Realisasi Anggaran 2021

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja hsl Prog. & Keluaran Keg. SKPD s.d Thn II (2021)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2022			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7
<b>1</b>	<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>	<b>Porsentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>300.351.716</b>	<b>63</b>	<b>35.481.400</b>	<b>2</b>	<b>105.981.900</b>	<b>2</b>	<b>105.981.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>65</b>	<b>141.463.300</b>	72.22	47.10
1.1	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan	2	dokumen	300.351.716	2	<b>35.481.400</b>	2	105.981.900	2	105.981.900	<b>100</b>	<b>100</b>	4	141.463.300	200	47.10
<b>2</b>	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi</b>	<b>18</b>	<b>%</b>	<b>3.481.991.780</b>	<b>17.89</b>	<b>340.123.600</b>	<b>17</b>	<b>1.449.999.520</b>	<b>17</b>	<b>1.449.999.520</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	750	Orang	1.092.070.447	18	139.264.200	300	50.017.000	300	50.017.000	<b>100</b>	<b>100</b>	318	189.281.200	42.4	17.33
2.2.	Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan kerja sama dengan sector swasta untuk penyediaan	Jumlah peralatan bantuan usaha pelatihan yang di berikan	0	Paket	0	0	0	18	549.999.800	18	549.999.800	<b>100</b>	<b>100</b>	18	549.999.800	0	0

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja hsl Prog. & Keluaran Keg. SKPD s.d Thn II (2021)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2022			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
	instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja																
2.3.	Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai	100	Lembaga	147.454.000	25	23.434.000	40	49.982.840	40	49.982.840	100	100	65	73.416.840	65	49.79
2.4.	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	384	orang	2.044.288.965	32	160.937.800	128	740.807.400	128	740.807.400	100	100	160	901.745.200	41.67	44.11
2.5	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)	55	OT	92.804.380	15	16.487.600	20	59.192.480	20	59.192.480	100	100	35	75.680.080	63.64	81.55
<b>3.</b>	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.</b>	<b>57.48</b>	<b>%</b>	<b>3.391.251.944</b>	<b>47.58</b>	<b>614.163.200</b>	<b>51.09</b>	<b>940.019.600</b>	<b>51.09</b>	<b>940.019.600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>1.554.182.000</b>		45.83
3.1..	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL	480	Orang	910.699.800	40	85.215.600	30	59.780.400	30	59.780.400	100	100	70	144.996.000	14.58	15.92
3.2.	Kegiatan Pengelolaan	Jumlah Pencari Kerja yang	5.250	Orang	388.974.000	0	49.460.500	1.750	67.146.000	1.750	67.146.000	100	100	1.750	116.606.500	33.33	29.98

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja hsl Prog. & Keluaran Keg. SKPD s.d Thn II (2021)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2022			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
	Informasi Pasar Kerja	ditempatkan melalui job fair															
3.3.	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	76.010	Orang	1.995.499.514	1.629	477.418.900	23.310	783.654.500	23.310	783.654.500	100	100	24.939	1.261.073.400	32.81	63.20
3.4.	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Dalam I (Satu)Daerah Provinsi	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	95	orang	96.078.630	20	2.068.200	60	29.438.700	60	29.438.700	100	100	80	31.506.900	84.21	32.80
4.	<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial</b>	23	%	1.025.630.908	15.94	186.002.400	22	1.007.000.000	22	1.007.000.000	100	100		1.193.002.400		116.32
4.1	Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	270	Perusahaan	743.997.600	60	130.939.200	90	219.922.600	90	219.922.600	100	100	150	350.861.800	55.55	47.16

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja hsl Prog. & Keluaran Keg. SKPD s.d Thn II (2021)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2022			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
	Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi]																
4.2	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK)	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan	11	Dokumen	281.633.308	11	55.063.200	11	787.077.400	11	787.077.400	100	100	22	842.140.600	200	299.02
5.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	23	%	3.466.483.655	21.49	725.768.600	22	175.092.100	22	175.092.100	100	100				

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja hsl Prog. & Keluaran Keg. SKPD s.d Thn II (2021)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2022			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
5.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	3.175	Perusahaan	3.466.483.655	367	725.768.600	1.055	175.092.100	1.055	175.092.100	100	100	1.422	900.860.700	44.79	25.99
6	<b>Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>persentase Kawasan Baru Transmigrasi</b>	100	%	280.462.183	100	61.462.840	1	86.979.320	1	86.979.320	100	100				
6.1	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen NKSAD.	1	dokumen	280.462.183	1	61.462.840	1	86.979.320	1	86.979.320	100	100	2	148.442.160	200	52.93
7	<b>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>persentase kawasan transmigrasi yang dibangun</b>	100	%	229.134.751	30	51.704.430	20	43.000.000	20	43.000.000	100	100				
7.1.	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah transmigran yang ditempatkan dalam 1 provinsi	60	KK	229.134.751	30	51.704.430	20	43.000.000	20	43.000.000	100	100	50	94.704.430	83.33	41.33

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Renstra Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Target Kinerja hsl Prog. & Keluaran Keg. SKPD s.d Thn II (2021)		Target Kinerja RKPD SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022				Capaian Target RPJMD s.d Tahun 2022			
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Target		Realisasi Tingkat Capaian Target	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=(7/6)*100		9=5+7		10=(9/4)*100	
8	Provinsi  Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan kawasan transmigrasi yang dikembangkan	100	%	229.134.751	30	51.704.430	60	44.823.300	60	44.823.300	100	100				
8.1.	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pemantapan	Jumlah peserta Bimtek	60	orang	229.134.751	30	51.704.430	60	44.823.300	60	44.823.300	100	100	90	96.527.730	150	42.13

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan PD berupa kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD dengan target kinerja dan dampak atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan organisasi yang jelas dan terukur. Adapun strategi dan arah kebijakan organisasi dapat dilihat pada Tabel 2.5.

*Tabel 2.5.  
Strategi Dan Arah Kebijakan*

<b>Visi : Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang</b>			
<b>Misi 5 : NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Tercapainya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1. Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	1.1. Peningkatan pelatihan produktivitas dan pengembangan penempatan tenaga kerja	1.1.1. Meningkatkan sertifikasi dan standarisasi kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja
			1.1.2. Meningkatkan efektivitas dan kontinuitas penempatan tenaga kerja
	2. Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial demi iklim ketenagakerjaan yang harmonis	2.1. Peningkatan perlindungan hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan	2.1.1. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja
			2.1.2. Meningkatkan Pengawasan Ketenagakerjaan

	3. Meningkatnya transmigran ditempatkan dan dibina	3.1 Meningkatnya perencanaan pembangunan dan Pembinaan transmigran di kawasan transmigrasi	3.1.1 Optimalisasi pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk dan pembinaan penduduk pada satuan permukiman.
--	--	--	---

Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi NTB 2019 – 2023, Indikator Kinerja Daerah (IKD) dari aspek kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB adalah:

**1. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** yang diikhtiarkan semakin menurun. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatannya dapat dilakukan dengan penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi yang dikelola masyarakat sehingga diharapkan terjadi penurunan tingkat pengangguran.

Pada Tahun 2020, target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat sebesar **3,35 persen**, dan realisasi TPT sebesar **4,22 persen**, sedangkan Tahun 2021, target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat sebesar **3,30 persen**, dan realisasi TPT sebesar **3,01 persen** dan Tahun 2022 TPT menurun sebesar **2,89 persen**

**2. Persentase Cakupan Penempatan Transmigran** terus dikembangkan demi mencapai pemerataan jumlah penduduk dan mengurangi kemiskinan. Program ketransmigrasian menjadi penting untuk dilaksanakan karena berperan dalam mengembangkan kawasan yang semula tidak produktif menjadi lebih berkembang dikarenakan banyak kegiatan-kegiatan produktifitas yang bisa dilakukan oleh warga transmigran. Transmigrasi juga berperan secara tidak langsung dalam penyerapan tenaga kerja pada sektor informal khususnya di pertanian dan perkebunan. Pada Tahun 2020, target Cakupan Penempatan Transmigran di Nusa Tenggara Barat sebesar **85 persen**, akibat adanya pandemi *covid-19* tidak dilakukan penempatan transmigran sehingga tidak adanya realisasi, sedangkan Tahun 2021, target Cakupan Penempatan Transmigran di Nusa Tenggara Barat sebesar **90 persen**, dan realisasi sebesar **84,19 persen**.



Tabel 2.6.  
Tabel capaian RPJMD Disnakertrans Prov. NTB 2019-2023.

Indikator	Sat.	Kondisi Awal RPJMD 2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,72	3,39	3,42	3,35	4,22	3,30	3,01	3,19	2,89	3,17	0	3,17
Cakupan Penempatan Transmigran	%	75	80	90,87	85	90,87	90	90,87	95	91,21	100	0	91,21

Ket :

\*) Tingkat Pengangguran Terbuka kondisi Agustus 2022 (data BPS Prov. NTB)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 2,89 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang penganggur. Pada Agustus 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin dibandingkan Agustus 2021, Pada Agustus 2022, TPT laki-laki sebesar 3,61 persen, lebih tinggi dibanding TPT Perempuan yang sebesar 1,91 persen. Dibandingkan Agustus 2021, TPT laki-laki naik sebesar 0,05 persen poin sedangkan TPT perempuan turun masing-masing sebesar 0,37 persen poin.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, TPT pada Agustus 2022 memiliki pola yang hampir sama dengan Agustus 2021. Pada Agustus 2022, TPT dari tamatan SMA Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang Pendidikan lainnya yaitu sebesar 6,99 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 1,23 persen. Dibandingkan Agustus 2021, kategori pendidikan yang mengalami penurunan TPT adalah untuk tamatan SMA Kejuruan yang turun sebesar 0,80 persen poin, diikuti dengan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah turun sebesar 0,29 persen poin, dan tamatan Universitas yang turun sebesar 0,06 persen poin.

Untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja telah dilakukan berbagai upaya dari pihak pemerintah, swasta dan berbagai elemen masyarakat.

Peran pemerintah dan swasta dalam penciptaan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dilakukan melalui program dan berbagai kegiatan pelatihan berbasis kompetensi baik yang dilaksanakan oleh BLK, LLK maupun LPK Swasta.

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah dan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga berdampak terjadinya pengangguran. Sehingga perlu merumuskan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja serta mengupayakan peningkatan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja sehingga tercipta kesempatan kerja yang luas, kondusif serta mendukung penyiapan tenaga kerja yang mandiri, berdaya saing serta sejahtera.

Untuk mewujudkan hal tersebut telah dilakukan upaya peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan pelayanan ketenagakerjaan. Untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja diupayakan melalui peningkatan perlindungan tenaga kerja. Melalui berbagai program dan kebijakan tersebut diharapkan tenaga kerja yang terserap makin meningkat, sehingga tingkat pengangguran makin berkurang.

Salah satu cara untuk menangani pengangguran adalah dengan bekerja sama dengan pihak - pihak lain untuk pelatihan, penempatan dan pemagangan tenaga kerja. Selain itu juga dengan menambah pelatihan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan anggaran dari APBD, APBN maupun sumber lain.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Isu-isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :

No.	Isu Strategis	permasalahan
1.	Tingginya angka pekerja setengah penganggur dan paruh waktu	TPT masih masih didominasi oleh pendidikan SMA/SMK
		Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal
		Masih rendahnya tenaga kerja yang bersertifikasi sesuai standar BNSP/LSP
		Terbatasnya jumlah perusahaan

		menengah dan besar di NTB
		Infomasi pasar kerja yang belum terupdate secara optimal
2	Belum optimalnya perlindungan bagi tenaga kerja	Masih terbatasnya perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perusahaan (PP)
		Masih rendahnya tenaga kerja yang mendapat jaminan perlindungan sosial
		Masih tingginya angka PMI unprosedural
3.	Pengelolaan kawasan transmigrasi yang belum optimal	Tunggakan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang belum tuntas
		Peningkatan kapasitas transmigran yang belum optimal
		Belum adanya roadmap pengelolaan kawasan transmigrasi
		Pengemabangan sasaran dan prasaran di kawasan yang belum optimal
		Terbatasnya kouta penempatan transmigran asal NTB

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil telaahan terhadap RKPD Tahun 2023 adalah sebagaimana Tabel 2.7.

*Tabel 2.7.  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD*

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Provinsi NTB	Porsentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	45	115.431.603	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Provinsi NTB	Porsentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	90	115.431.603	
1.1	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan	dokumen	2	115.431.603	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan	dokumen	2	115.431.603	
1.1.1.	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen PTKD Makro yang di hasilkan	dokumen	1	85.000.000	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen PTKD Makro yang di hasilkan	dokumen	1	85.000.000	
1.1.2	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro yang dihasilkan	dokumen	1	30.431.603	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan pemagangan	dokumen	1	30.431.603	
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Provinsi NTB	Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	15	1.419.748.597	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Provinsi NTB	Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	18	1.419.748.597	
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Provinsi NTB	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang	230	518.712.742	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Provinsi NTB	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang	300	518.712.742	

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.1	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BID. LATTAS]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	Orang	230	466.025.748	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BID. LATTAS]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	Orang	300	466.025.748	
2.1.2.	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS]	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan pemagangan	Dokumen	2	52.686.994	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS]	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan pemagangan	Dokumen	2	52.686.994	
<b>2.2.</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Provinsi NTB</b>	<b>Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai</b>	<b>Lembaga</b>	<b>45</b>	58.000.000	<b>Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Provinsi NTB</b>	<b>Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai</b>	<b>Lembaga</b>	<b>40</b>	58.000.000	
2.2.1	Sub Kegiatan Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS].	Provinsi NTB	Jumlah LPK yang di Akreditasi	LPK	45	58.000.000	Sub Kegiatan Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS].	Provinsi NTB	Jumlah LPK yang di Akreditasi	LPK	40	58.000.000	
<b>2.3.</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	<b>Provinsi NTB</b>	<b>Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi</b>	<b>Orang</b>	<b>208</b>	811.134.066	<b>Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	<b>Provinsi NTB</b>	<b>Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi</b>	<b>Orang</b>	<b>160</b>	811.134.066	
2.3.1	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BLK]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	208	811.134.066	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BLK]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	160	811.134.066	
2.3.2.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Provinsi NTB	Jumlah sarana dan prasarana pelatihan	Unit		0	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana	Provinsi NTB	Jumlah sarana dan prasarana pelatihan	Unit		0	

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pelatihan Kerja						
2.4.	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi NTB	jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)	OT	5	31.901.790,12	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi NTB	jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)	OT	20	31.901.790,12	
2.4.1	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja [BLK]	Provinsi NTB	jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)	OT	5	31.901.790,12	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja [BLK]	Provinsi NTB	jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)	OT	20	31.901.790,12	
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Provinsi NTB	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.	%	40,00	1.284.310.532,82	Program Penempatan Tenaga Kerja	Provinsi NTB	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.	%	57,48	1.284.310.532,82	
3.1	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Provinsi NTB	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL	Orang	30	303.566.600	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Provinsi NTB	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL	Orang	160	303.566.600	
3.1.1	Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal) [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.	Orang	30	303.566.600	Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal) [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.	Orang	160	303.566.600	
3.2	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang	1.360	129.658.000	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang	2.000	129.658.000	
3.2.1	Sub Kegiatan Job Fair /Buruh Kerja [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang	1.360	129.658.000	Sub Kegiatan Job Fair /Buruh Kerja [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang	2.000	129.658.000	
3.3	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	Orang	26.438	794.085.932,82	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	Orang	29.240	794.085.932,82	

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.3.1.	Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah PMI Bermasalah Yang Ditangani	Orang	2.045	281.120.000	Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah PMI Bermasalah Yang Ditangani	Orang	1.600	281.120.000	
3.3.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah PMI Ke Luar Negeri Yang Dilayani Di LTSA	Orang	24.000	398.336.832,82	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah PMI Ke Luar Negeri Yang Dilayani Di LTSA	Orang	27.500	398.336.832,82	
3.3.3.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari kerja, PMI Purna Yang Diberdayakan	Orang	393	114.629.100	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah Pencari kerja, PMI Purna Yang Diberdayakan	Orang	140	114.629.100	
<b>3.4</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu)Daerah Provinsi</b>	<b>Provinsi NTB</b>	<b>Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan</b>	<b>Orang</b>	<b>58</b>	<b>57.000.000</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu)Daerah Provinsi</b>	<b>Provinsi NTB</b>	<b>Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan</b>	<b>Orang</b>	<b>95</b>	<b>57.000.000</b>	
3.4.1.	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	Orang	58	<b>57.000.000</b>	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi [BID. PENEMPATAN]	Provinsi NTB	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	Orang	95	<b>57.000.000</b>	

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Program Hubungan Industrial	Provinsi NTB	persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	20	388.419.557,17	Program Hubungan Industrial	Provinsi NTB	persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	23	388.419.557,17	
4.1	Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan	70	282.999.200	Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan	100	282.999.200	
4.1.1	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah perusahaan yang dibina	perusahaan	70	169.210.500	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah perusahaan yang dibina	perusahaan	100	169.210.500	
4.1.2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan Yang Diberdayakan Melalui Perjanjian KerjasamaTripartit	Lembaga	11	113.788.700	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan Yang Diberdayakan Melalui Perjanjian KerjasamaTripartit	Lembaga	11	113.788.700	



NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.2	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota (UMSK)	Provinsi NTB	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Dokumen	11	105.420.357,17	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota (UMSK)	Provinsi NTB	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Dokumen	11	105.420.357,17	
4.2.1	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan UMK [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah jenis dokumen upah minimum yang ditetapkan	Dokumen	11	105.420.357,17	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan UMK [BID. HI]	Provinsi NTB	Jumlah jenis dokumen upah minimum yang ditetapkan	Dokumen	11		
5	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi NTB	persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	20	1.312.801.745,31	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi NTB	persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	23	1.312.801.745,31	
5.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan	625	1.312.801.745,31	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan	1.115	1.312.801.745,31	
5.1.1.	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya	Perusahaan	50	102.101.462,29	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya	Perusahaan	90	102.101.462,29	
5.1.2.	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	P. Sumbawa	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	80	88.204.124,59	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	P. Sumbawa	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	95	88.204.124,59	
5.1.3.	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	P. Lombok	Jumlah Perusahaan Yang Diperiksa Pelaksanaan Norma Kerjanya Di Pulau Lombok	Perusahaan	100	121.527.256,62	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	P. Lombok	Jumlah Perusahaan Yang Diperiksa Pelaksanaan Norma Kerjanya Di Pulau Lombok	Perusahaan	110	121.527.256,62	

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.4.	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BID. WAS]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya	Perusahaan	50	121.049.752,50	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BID. WAS]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya	Perusahaan	75	121.049.752,50	
5.1.5.	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BPKPS]	P. Sumbawa	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	20	83.069.401,69	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BPKPS]	P. Sumbawa	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	35	83.069.401,69	
5.1.6.	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma K3-nya	Perusahaan	75	132.903.584,93	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Provinsi NTB	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma K3-nya	Perusahaan	90	132.903.584,93	
5.1.7.	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	P. Sumbawa	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	100	87.676.643,10	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	P. Sumbawa	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	120	87.676.643,10	
5.1.8.	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	P. Lombok	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Lombok	Orang	150	576.269.519,59	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	P. Lombok	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Lombok	Orang	500	576.269.519,59	
<b>6</b>	<b>Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>Provinsi NTB</b>	<b>persentase Kawasan Baru Transmigrasi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>103.979.641,41</b>	<b>Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>Provinsi NTB</b>	<b>persentase Kawasan Baru Transmigrasi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>103.979.641,41</b>	
<b>6.1</b>	<b>Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi</b>	<b>Provinsi NTB</b>	<b>Jumlah Dokumen NKSAD.</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>103.979.641,41</b>	<b>Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi</b>	<b>Provinsi NTB</b>	<b>Jumlah Dokumen NKSAD.</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>103.979.641,41</b>	
6.1.1.	Sub Kegiatan Advokasi Dan Musyawarah Penetapan Kawasan [BID. TRANS]	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen NKSAD.	Dokumen	1	50.000.000	Sub Kegiatan Advokasi Dan Musyawarah Penetapan Kawasan [BID. TRANS]	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen NKSAD.	Dokumen	1	50.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
				Sat.	Target					Sat.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen penyiapan tanah untuk kawasan transmigrasi	Dokumen	1	53.979.641,41	Sub Kegiatan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Provinsi NTB	Jumlah Dokumen penyiapan tanah untuk kawasan transmigrasi	Dokumen	1	53.979.641,41	
<b>7</b>	<b>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>Provinsi NTB</b>	<b>persentase kawasan transmigrasi yang dibangun</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>94.134.760,08</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Provinsi NTB</b>	<b>persentase kawasan transmigrasi yang dibangun</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>94.134.760,08</b>	
<b>7.1.</b>	<b>Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Provinsi NTB</b>	<b>Jumlah transmigran yang ditempatkan dalam 1 provinsi</b>	<b>KK</b>	<b>20</b>	<b>94.134.760,08</b>	<b>Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Provinsi NTB</b>	<b>Jumlah transmigran yang ditempatkan dalam 1 provinsi</b>	<b>KK</b>	<b>20</b>	<b>94.134.760,08</b>	
7.1.1.	Sub Kegiatan Pindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah transmigran yang ditempatkan dalam 1 provinsi	KK	20	94.134.760,08	Sub Kegiatan Pindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah transmigran yang ditempatkan dalam 1 provinsi	KK	20	94.134.760,08	
<b>8</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>Provinsi NTB</b>	<b>Cakupan kawasan transmigrasi yang dikembangkan</b>	<b>%</b>	<b>93,75</b>	<b>60.823.545,45</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>Provinsi NTB</b>	<b>Cakupan kawasan transmigrasi yang dikembangkan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>60.823.545,45</b>	
8.1.	<b>Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pematapan</b>	<b>Provinsi NTB</b>	<b>Jumlah peserta Bimtek</b>	<b>orang</b>	<b>60</b>	<b>60.823.545,45</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pematapan</b>	<b>Provinsi NTB</b>	<b>Jumlah peserta Bimtek</b>	<b>orang</b>	<b>20</b>	<b>60.823.545,45</b>	
8.1.1.	Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Pematapan satuan pemukiman. [BID. TRANS]	Provinsi NTB	Jumlah peserta Bimtek	Orang	60	60.823.545,45	Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Pematapan satuan pemukiman. [BID. TRANS]	Provinsi NTB	Jumlah peserta Bimtek	Orang	20	60.823.545,45	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

*Tabel 2.8.*  
*Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023*

<b>Program</b>	<b>Indikator</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Target</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>	<b>Porsentase kab/kota yang menyusun rencana tenaga kerja</b>				
Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokjumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan	Provinsi NTB	1 Dokumen	APBD Murni 2023	
<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi</b>				
Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	Mataram	300 Orang	APBD Murni 2023	
Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai	10 Kab/Kota	40 Lembaga	APBD Murni 2023	

Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)	10 Kab/Kota	20 OT	APBD Murni 2023	
<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan.</b>				
Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL	Mataram, Lobar, Lotra, Sumbawa, kota Bima	160 Orang	APBD Murni 2023	
Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Mataram, KSB	2.000 orang	APBD Murni 2023	
Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	Lotim, Loteng, Sumbawa	29.240 orang	APBD Murni 2023	
Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu)Daerah Provinsi	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	10 Kab/Kota	95 orang	APBD Murni 2023	
<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>Persentase perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perusahaan</b>				

Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	10 Kab/Kota	100 perusahaan	APBD Murni 2023	
Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK)	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	10 Kab/Kota	11 Dokumen	APBD Murni 2023	

<b>Program Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>persentase Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan &amp; K3</b>				
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	10 Kab/Kota	1.115 perusahaan	APBD Murni 2023	
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	persentase transmigran yang ditempatkan				
Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen NKSAD.	Kaltim, Sutra	1 Dokumen	APBD Murni 2023	
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>persentase lahan usaha yang sudah dikelola</b>				
Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan dalam 1 provinsi	Kaltim, Sutra	20 KK	APBD Murni 2023	
<b>Program Pengembangan Kawasan</b>	<b>persentase satuan permukiman yang mandiri</b>				



<b>Transmigrasi</b>					
Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pematapan	Jumlah peserta Bimtek	Tambora, Labangka	20 Orang	APBD Murni 2023	

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Tujuan**

Tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 adalah:

- a. Tercapainya Penurunan Pengangguran Terbuka** dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.
- b. Terwujudnya Pengelolaan Kawasan transmigrasi yang optimal** dengan indikator Cakupan pengelolaan Kawasan transmigrasi (Satuan Kawasan Permukiman).

**3.2. Sasaran**

Adapun Sasaran Renja yaitu :

- a. Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat dengan indikator persentase penyerapan angkatan kerja.
- b. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis/kondusif indikator persentase perusahaan yang harmonis/kondusif.
- c. Meningkatnya Transmigran yang ditempatkan persentase transmigran yang ditempatkan dan dibina.

*Tabel 3.1*  
*Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan*  
*Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Formulasi
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tercapainya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,39	3,35	3,30	3,19	3,17	$\frac{\sum \text{Pengangguran}}{\sum \text{Angkatan Kerja}} \times 100 \%$

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Formulasi
				2019	2020	2021	2022	2023	
		Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Persentase penyerapan angkatan kerja	96,61	96,65	96,70	96,81	96,83	$\frac{\sum \text{Angkatan Kerja yang terserap}}{\sum \text{Angkatan Kerja}} \times 100 \%$
		Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis/kondusif	Persentase perusahaan yang harmonis/kondusif	98,74	98,75	98,77	99,06	99,16	$\frac{\sum \text{Persentase perusahaan yang harmonis/kondusif}}{\sum \text{Perusahaan}} \times 100 \%$
		Meningkatnya Transmigran yang ditempatkan	Persentase transmigran yang ditempatkan dan dibina	97,57	97,57	97,57	97,57	100	$\frac{\sum \text{Transmigran yang sudah (UPT) ditempatkan dan dibina}}{\sum \text{Transmigrasi}} \times$

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB memiliki tugas dan fungsi mendukung misi kepala daerah nomor 5 yaitu **NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.**

Pada misi 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTB tahun 2019-2023, tujuan utamanya adalah terwujudnya perindustrian yang unggul dengan indikator kinerja pertumbuhan industri di Provinsi NTB. Sedangkan tujuan renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB adalah merupakan salah satu sasaran dari misi yang kelima yaitu menurunnya pengangguran terbuka dengan indikator kinerja adalah tingkat pengangguran terbuka. Diakhir periode lima tahunan diharapkan tingkat pengangguran ini dapat ditekan menjadi 3,17 persen, dengan program prioritas sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial
4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
7. Program Pengembangan kawasan Transmigrasi

Adapun sasaran disnakertrans NTB tahun 2019-2023 ada dua yaitu meningkatnya kesempatan kerja masyarakat dan terjaganya hubungan industrial dan iklim ketenagakerjaan yang harmonis. Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, dapat mengurangi angka pengangguran. Hal ini dapat dicapai apabila tenaga kerja memiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. Sehingga penempatan tenaga kerja baik pada sektor formal maupun informal dapat ditingkatkan. Penempatan tenaga kerja juga dapat dilakukan melalui program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Kedua program tersebut diharapkan mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat pada sektor informal.

Sasaran Disnakertrans Provinsi NTB 2019-2023 yang kedua yaitu hubungan industrial dan iklim ketenagakerjaan yang harmonis. Kedua Hal tersebut dapat dijaga melalui kepastian hak-hak pekerja dalam pemenuhan standar hidup dan terjaminnya

keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga konflik atau kasus hubungan industrial dapat ditekan untuk menjaga kenyamanan berusaha.

Salah satu fungsi dari Disnakertrans Prov. NTB adalah menyiapkan informasi bursa kerja dalam negeri dan luar negeri. Tentunya informasi ini harus tersedia dalam bentuk informasi manual dan informasi berbasis elektronik.

Dalam rangka meningkatkan layanan informasi kepada pencari kerja dan sesuai dengan kemajuan zaman, informasi pasar kerja berbasis elektronik menjadi suatu keharusan. Dengan adanya informasi berbasis elektronik ini, penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan cakupan sasaran pencari kerja untuk mendapatkan informasi menjadi lebih banyak.

Diharapkan masyarakat/ pencari kerja lebih siap dalam menyiapkan kompetensi sesuai dengan jenis jabatan yang ditawarkan sehingga tidak tertipu oleh janji oknum/ Calo.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah. Untuk menghadapi tantangan di bidang ketenagakerjaan ini, Disnakertrans Prov. NTB menetapkan lokus program atau kebijakan yang meliputi :

1. Penciptaan lapangan kerja baru melalui program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan lewat informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri. Sedangkan untuk perluasan kesempatan kerja digulirkan melalui padat karya, wirausaha baru, tenaga kerja mandiri dan inkunasi bisnis.
2. Mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) agar lulusan BLK/LLK/LPKS bersertifikasi standar BNSP.
3. Optimalisasi MoU dengan DUDI terkait kebutuhan pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
4. Membangun Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pelaksanaan program pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, sertifikasi, pemagangan dan program koordinasi lintas sector pelatihan vokasi nasional.
5. Perlindungan buruh migran Indonesia melalui program fasilitasi buruh migran sekaligus bentuk perlindungannya.
6. Jaminan sosial untuk tenaga kerja melalui kepesertaan Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan.
7. Pengawasan Ketenagakerjaan dengan menyoar perusahaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib lapor ketenagakerjaan.

8. Peningkatan kapasitas bagi transmigran
9. Optimalisasi sarana dan prasarana di Kawasan transmigrasi labangka dan Tambora
10. Penyelasaan Sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigran

Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi referensi dalam pembangunan sector ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di provinsi NTB melalui Program/Kegiatan unggulan untuk mewujudkan Visi/Misi pemerintah Provinsi NTB 2019-2023.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023, dijelaskan bahwa visi Gubernur Nusa Tenggara Barat adalah “ **Membangun Nusa Tenggara Barat yang GEMILANG** ”.

Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci “**NTB GEMILANG**” yang bermakna :

1. Suatu kondisi Masyarakat NTB yang mampu memenuhi hak-hak dasarnya di bidang ekonomi, social dan budaya, yang dipenuhi dari hasil kreatifitas dan inovasi SDM masyarakat NTB melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
2. Suatu keadaan yang menggambarkan masyarakat NTB yang siap dan tanggap menghadapi berbagai bencana yang didukung oleh kelembagaan dan infrastruktur yang memadai.
3. Suatu kondisi masyarakat NTB yang aman, damai dan harmonis, yang didukung oleh Pemerintahan yang professional melayani, bebas dari KKN, transparan dan akuntabel, bersendikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan universal dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur.

Disnakertrans NTB dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengemban makna nomor 1 (satu) dari visi kepala dan wakil kepala daerah yaitu suatu kondisi Masyarakat NTB yang mampu memenuhi hak-hak dasarnya di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang dipenuhi dari hasil kreatifitas dan inovasi SDM masyarakat NTB melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Sehingga Disnakertrans NTB akan berperan besar dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat khususnya pekerja atau kaum buruh, dan para transmigran agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup yang layak dengan terus meningkatkan kompetensi dan kemandirian mereka.

Dalam rangka pencapaian visinya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menetapkan 6 [ enam ] misi yaitu :

1. Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;
2. Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;

3. Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;
4. Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;
6. Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan;

Memperhatikan keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan, dengan misi-misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung pelaksanaan satu misi saja yaitu :

**Misi 5 : NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi; untuk urusan wajib non pelayanan dasar ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketransmigrasian.**

Dalam rangka pencapaian visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bidang ekonomi melalui peningkatan kualitas dan kompetensi SDM dapat dicapai apabila sumber-sumber daya yang daerah miliki dapat dimaksimalkan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat potensi yang dimanfaatkan belum optimal. Salah satunya adalah terdapatnya Kawasan Ekonomi Khusus di daerah Mandalika dan akan digelarnya event moto GP dimana hal tersebut diyakini mampu memberikan multiplier effects terhadap pembangunan daerah. Begitu halnya dengan sektor pertanian dimana NTB merupakan salah satu daerah pengekspor hasil-hasil pertanian ke daerah-daerah atau negara-negara lain. Namun terdapat beberapa faktor penghambat dalam pencapaian visi misi tersebut antara lain kurangnya tenaga kerja lokal yang mampu bersaing dengan tenaga kerja luar mengingat kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kompetensi yang kita siapkan. Selanjutnya, kurangnya pengembangan dan pengetahuan tentang teknologi yang mutakhir dalam pengembangan sektor-sektor terkait padahal penggunaan teknologi merupakan suatu keharusan untuk

mengembangkan iklim perindustrian di NTB. Ditambah lagi dengan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka yang mengindikasikan masih kurangnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dari perspektif ekonomi.



*Tabel 4.1.  
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan  
Prakiraan Maju Tahun 2024*

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
Tercapainya Penurunan Tingkat Penganggu ran Terbuka (TPT)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik				Indeks	85,00		85,00	
			2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Lakip OPD	Indeks	90,00	25.563.372.366,36	90,00	28.119.709.604,93
			2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	23	381.238.079,00	23	419.361.886,90

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (SKPD INDUK)	Jumlah dokumen	dokumen	1	133.830.260,00	1	147.213.286,00
			2.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen (INDUK)	dokumen	1	18.303.012,00	1	20.133.313,20
					Jumlah dokumen (UPTD BLK DLN)	dokumen	1	10.653.552,00	1	11.718.907,20
					Jumlah dokumen (UPTD BPKK3 P. LOMBOK)	dokumen	1	6.223.140,00	1	6.845.454,00
					Jumlah dokumen (UPTD BPKK3 P. SUMBAWA)	dokumen	1	6.000.000,00	1	6.600.000,00
			2.07.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen (INDUK)	dokumen	1	20.538.000,00	1	22.591.800,00
					Jumlah dokumen (UPTD BLK DLN)	dokumen	1	10.653.552,00	1	11.718.907,20

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
					Jumlah dokumen (UPTD BPKK3 P. LOMBOK)	dokumen	1	3.000.000,00	1	3.300.000,00
					Jumlah dokumen (UPTD BPKK3 P. SUMBAWA)	dokumen	1	3.000.000,00	1	3.300.000,00
			2.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen (INDUK)	dokumen	1	12.114.648,00	1	13.326.112,80
					Jumlah dokumen (UPTD BLK DLN)	dokumen	1	10.653.552,00	1	11.718.907,20
					Jumlah dokumen (UPTD BPKK3 P. LOMBOK)	dokumen	1	6.357.960,00	1	6.993.756,00
					Jumlah dokumen (UPTD BPKK3 P. SUMBAWA)	dokumen	1	6.000.000,00	1	6.600.000,00
			2.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah dokumen (INDUK)	dokumen	1	8.779.176,00	1	9.657.093,60
					Jumlah dokumen (UPTD BLK DLN)	dokumen	1	10.653.552,00	1	11.718.907,20

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
					Jumlah dokumen (UPTD BPKK3 P. LOMBOK)	dokumen	1	6.223.140,00	1	6.845.454,00
					Jumlah dokumen (UPTD BPKK3 P. SUMBAWA)	dokumen	1	6.000.000,00	1	6.600.000,00
			2.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	dokumen	5	14.899.248,00	5	16.389.172,80
			2.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	dokumen	1	87.355.287,00	1	96.090.815,70
			2.07.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan Administrasi Keuangan</b>	<b>dokumen</b>	<b>9</b>	<b>20.565.826.958,02</b>	<b>9</b>	<b>22.622.409.653,82</b>
			2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	215	20.352.144.566,02	215	22.387.359.022,62

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Induk)	Orang	2	117.337.000,00	2	129.070.700,00
			2.07.01.1.02.04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Laporan (Induk)	Dokumen	2	13.269.696,00	2	14.596.665,60
					Jumlah Laporan (BLK DLN)	Dokumen	1	45.319.461,00	1	49.851.407,10
					Jumlah Laporan (BPKPL)	Dokumen	1	11.858.000,00	1	13.043.800,00
					Jumlah Laporan (BPKPS)	Dokumen	1	4.156.713,00	1	4.572.384,30
			2.07.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan (Induk)	Dokumen	1	7.383.299,00	1	8.121.628,90
					Jumlah Laporan (BLK DLN)	Dokumen	1	8.726.883,00	1	9.599.571,30

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			<b>2.07.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan Barang Milik Daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>4</b>	<b>57.500.000,00</b>	<b>4</b>	<b>63.250.000,00</b>
			2.07.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD (Induk)	Laporan	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00
					Jumlah BMD (BLK DLN)	Laporan	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00
					Jumlah BMD (BPKPL)	Laporan	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00
					Jumlah BMD (BPKPS)	Laporan	1	7.500.000,00	1	8.250.000,00
			<b>2.07.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang mendapat pelatihan</b>	<b>orang</b>	<b>182</b>	<b>232.364.440,00</b>	<b>204</b>	<b>255.600.884,00</b>

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.01.1.05.05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah ASN yang di diklat Formal (Induk)	Orang	177	38.363.160,00	190	42.199.476,00
			2.07.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang di diklat Formal (BLK DLN)	Orang	5	6.550.500,00	5	7.205.550,00
					Jumlah ASN yang di diklat Formal (BPKPL)	Orang	9	187.450.780,00	9	206.195.858,00
			<b>2.07.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>laporan administrasi umum</b>	<b>dokumen</b>	<b>28</b>	<b>957.635.088,28</b>	<b>28</b>	<b>1.053.398.597,11</b>
			2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik (Induk)	Jenis	11	7.301.866,00	11	8.032.052,60
					Jumlah Instalasi Listrik (BLK DLN)	Jenis	25	17.739.447,00	25	19.513.391,70
					Jumlah Instalasi Listrik BPKPL)	Jenis	5	1.940.840,00	5	2.134.924,00

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor (Induk)	Jenis	8	89.489.886,56	8	98.438.875,22
					Jumlah peralatan kantor (BLK DLN)	Jenis	15	285.000.000,00	15	313.500.000,00
					Jumlah peralatan kantor (BPKPL)	Jenis	5	27.500.000,00	5	30.250.000,00
					Jumlah peralatan kantor (BPKPS)	Jenis	5	27.500.000,00	5	30.250.000,00
			2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK (Induk)	Jenis	30	26.504.250,63	30	29.154.675,69
					Jumlah Jenis ATK (BLK DLN)	Jenis	15	21.526.791,00	15	23.679.470,10
					Jumlah Jenis ATK (BPKPL)	Jenis	10	22.330.022,00	10	24.563.024,20



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana		Perkiraan Maju	
							Tahun 2023		Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
					Jumlah Jenis ATK (BPKPS)	Jenis	18	4.160.585,00	18	4.576.643,50
			2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan (Induk)	Eksemplar	7	10.294.284,00	7	11.323.712,40
					Jumlah Cetak dan Penggandaan (BLK DLN)	Eksemplar	5	14.376.252,00	5	15.813.877,20
					Jumlah Cetak dan Penggandaan (BPKPL)	Eksamp	1	5.090.316,00	1	5.599.347,60
					Jumlah Cetak dan Penggandaan (BPKPS)	Eksamp	3	5.346.000,00	3	5.880.600
					Jumlah eksemplar (Induk)	Eksemplar	7	10.236.600,00	7	11.260.260
			2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar (BLK DLN)	Eksemplar	6	10.525.185,00	6	11.577.704
					Jumlah eksemplar (BPKPL)	Eksemplar	6	8.712.000,00	6	9.583.200

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah eksemplar (BPKPS)	Eksemplar	1	8.800.000,00	1	9.680.000
			2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang (Induk)	Orang	263	14.126.750,00	265	15.539.425
			2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang (BLK DLN)	Orang	250	31.581.000,00	252	34.739.100
			2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang BPKPL	Orang	150	5.263.500,00	152	5.789.850
			2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang (BPKPS)	Orang	200	6.000.000,00	202	6.600.000
			2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat (Induk)	Orang/tahun	15	120.000.000,00	17	132.000.000
			2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat (BLK DLN)	Orang/tahun	5	91.223.205,25	7	100.345.526
			2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat	Orang/tahun	2	45.916.307,84	3	50.507.939

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
					(BPKPL)	tahun				
					Jumlah Rapat rip (BPKPS)	Orang/tahun	4	37.500.000,00	5	41.250.000
			<b>2.07.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>jumlah sarana dan prasarana kantor</b>	<b>Unit</b>	<b>1</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>1</b>	<b>330.000.000</b>
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan (Induk)	Unit	1	300.000.000,00	1	330.000.000
			<b>2.07.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>orang</b>	<b>62</b>	<b>2.539.029.041,07</b>	<b>62</b>	<b>2.792.931.946</b>
			2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa	Jumlah Surat Keluar	Surat	139	1.548.800,00	140	1.703.680

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
					Jumlah Surat Keluar (BLK DLN)	Surat	146	1.936.000,00	148	2.129.600
					Jumlah Surat Keluar (BPKPL)	Surat	115	2.582.490,90	116	2.840.740
					Jumlah Surat Keluar (BPKPS)	Surat	96	2.063.050,00	97	2.269.355
			2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening (Induk)	Rekening	4	352.351.453,50	4	387.586.599
					Jumlah Rekening (BLK DLN)	Rekening	6	135.036.000,00	6	148.539.600
					Jumlah Rekening (BPKPL)	Rekening	3	38.478.000,00	3	42.325.800
					Jumlah Rekening (BPKPS)	Rekening	3	22.052.250,00	3	24.257.475

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa pelayanan Umum Kantor (Induk)	Orang	38	980.543.821,92	38	1.078.598.204
					Jumlah Tenaga Jasa pelayanan Umum Kantor (BLK DLN)	Orang	13	601.764.308,75	13	661.940.740
					Jumlah Tenaga Jasa pelayanan Umum Kantor (BPKPL)	Orang	6	217.800.000,00	6	239.580.000
					Jumlah Tenaga Jasa pelayanan Umum Kantor (BPKPS)	Orang	5	182.872.866,00	5	201.160.153
			<b>2.07.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>jumlah barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>69</b>	<b>529.778.760,00</b>	<b>69</b>	<b>582.756.636</b>
			2.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan (Induk)	Unit	13	92.250.400,00	13	101.475.440
					Jumlah Kendaraan	Unit	8	96.340.200,00	8	105.974.220

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(BLK DLN)					
					Jumlah Kendaraan (BPKL)	Unit	3	21.780.000,00	3	23.958.000
					Jumlah Kendaraan (BPKPS)	Unit	4	48.945.710,00	4	53.840.281
			2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor (Induk)	Gedung	1	44.171.050,00	1	48.588.155
					Jumlah Gedung kantor (BLK DLN)	Gedung	1	98.500.000,00	1	108.350.000
					Jumlah Gedung kantor (BPKPL)	Gedung	1	38.500.000,00	1	42.350.000
					Jumlah Gedung kantor (BPKPS)	Gedung	1	27.500.000,00	1	30.250.000
			2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Induk)	Unit	11	18.876.000,00	11	20.763.600

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
				Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (BLK DLN)	Unit	23	27.500.000,00	23	30.250.000
					Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (BPKPL)	Unit	3	10.998.900,00	3	12.098.790
					Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (BPKPS)	Unit	2	4.416.500,00	2	4.858.150
			<b>2.07.02</b>	<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>	<b>Porsentase kab/kota yang menyusun rencana tenaga kerja</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>115.431.602,71</b>	<b>90</b>	<b>126.974.763</b>
			2.07.02.1.01	<b>Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Jumlah Dokjumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan</b>	<b>dokumen</b>	<b>2</b>	<b>115.431.602,71</b>	<b>2</b>	<b>126.974.763</b>
			2.07.02.1.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga	Jumlah Dokumen PTKD Makro yang di	Dokumen	1	85.000.000,00	1	93.500.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.02.1.01.02	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro yang di hasilkan	Dokumen	1	30.431.602,71	1	33.474.763
	<b>Meningkatnya Kesempatan Kesempatan Kerja Masyarakat</b>	<b>Persentase penyerapan angkatan kerja</b>				%	<b>96,83</b>		<b>96,83</b>	
			2.07.03	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi</b>	%	<b>18</b>	<b>1.419.748.596,70</b>	<b>18</b>	<b>1.759.507.395</b>
			2.07.03.1.01	<b>Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster</b>	<b>Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat</b>	Orang	<b>300</b>	<b>518.712.741,48</b>	<b>305</b>	<b>570.584.016</b>



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
				<b>Kompetensi</b>	<b>kompetensi</b>					
			2.07.03.1.01.01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BID. LATTAS]	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	Orang	300	466.025.747,85	305	512.628.323
				Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan pemagangan	Dokumen	2	52.686.993,63	2	57.955.693

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
				[BID. LATTAS]						
			2.07.03.1.02	<b>Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai</b>	<b>Lemba ga</b>	<b>40</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>43</b>	<b>63.800.000</b>
			2.07.03.1.02.01	Sub Kegiatan Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS].	Jumlah LPK yang di Akreditasi	LPK	40	58.000.000,00	43	63.800.000

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.03.1.01	<b>Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	<b>Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi</b>	<b>Orang</b>	<b>160</b>	<b>811.134.065,10</b>	<b>162</b>	<b>892.247.472</b>
			2.07.03.1.01.01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BLK]	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	160	811.134.065,10	162	892.247.472
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah sarana dan prasarana pelatihan	Unit	0	0	0	0
				<b>Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat</b>	<b>jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan</b>	<b>OT</b>	<b>20</b>	<b>31.901.790,12</b>	<b>22</b>	<b>35.091.969</b>

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
				<b>Daerah Provinsi</b>	<b>(forma/ informal)</b>					
				Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja [BLK]	jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)	OT	20	31.901.790,12	22	35.091.969
			2.07.04	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.</b>	<b>%</b>	<b>57,48</b>	<b>1.284.310.532,82</b>	<b>57,48</b>	<b>1.412.741.586</b>
			2.07.04.1.01	<b>Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL</b>	<b>Orang</b>	<b>160</b>	<b>303.566.600,00</b>	<b>162</b>	<b>333.923.260</b>
			2.07.04.1.01.04	Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.	Orang	160	303.566.600,00	162	333.923.260

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
				Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal) [BID. PENEMPATAN]						
			<b>2.07.04.1.03</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair</b>	<b>Orang</b>	<b>2.000</b>	<b>129.658.000,00</b>	<b>2.100</b>	<b>142.623.800</b>
			2.07.04.1.03.03	Sub Kegiatan Job Fair /Buruh Kerja [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang	2.000	129.658.000,00	2.100	142.623.800
			2.07.04.1.04	<b>Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.</b>	<b>Orang</b>	<b>29.240</b>	<b>794.085.932,82</b>	<b>29.240</b>	<b>873.494.526</b>

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.04.1.04.01	Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia [BID. PENEMPATAN]	Jumlah PMI Bermasalah Yang Ditangani	Orang	1.600	281.120.000,00	1.760	309.232.000
			2.07.04.1.04.03	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran [BID. PENEMPATAN]	Jumlah PMI Ke Luar Negeri Yang Dilayani Di LTSA	Orang	27.500	398.336.832,82	30.000	438.170.516
			2.07.04.1.04.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari kerja, PMI Purna Yang Diberdayakan	Orang	140	114.629.100,00	150	126.092.010

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.04.1.06	<b>Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu)Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan</b>	<b>Orang</b>	<b>95</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>95</b>	<b>62.700.000</b>
			2.07.04.1.06.01	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi [BID. PENEMPATAN]	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	Orang	95	57.000.000,00	100	62.700.000
	<b>Menurunnya perselisihan</b>	<b>Persentase penurunan angka</b>				<b>%</b>	<b>22,86</b>		<b>22,86</b>	

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
	n Hubungan Industrial demi iklim ketenagakerjaan yang harmonis	perselisihan hubungan industrial								
			2.07.05	Program Hubungan Industrial	persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	23	388.419.557,17	23	427.261.513
			2.07.05.1.02	Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan	100	282.999.200,00	110	311.299.120



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
				<b>Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>						
			2.07.05.1.02.01	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi [BID. HI]	Jumlah perusahaan yang dibina	perusahaan	100	169.210.500,00	110	186.131.550

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
										2.07.05.1.02.04
			<b>2.07.05.1.03</b>	<b>Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK)</b>	<b>Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.</b>	<b>Dokumen</b>	<b>11</b>	<b>105.420.357,17</b>	<b>11</b>	<b>115.962.393</b>

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
										2.07.05.1.03.01
			<b>2.07.06</b>	<b>Program Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>porcentage perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan &amp; K3</b>	<b>%</b>	<b>23</b>	<b>1.312.801.745,31</b>	<b>23</b>	<b>1.444.081.920</b>
			<b>2.07.06.1.01</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>1.115</b>	<b>1.312.801.745,31</b>	<b>1.115</b>	<b>1.444.081.920</b>
			2.07.06.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya	Perusahaan	90	102.101.462,29	95	112.311.609

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.06.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	95	88.204.124,59	100	97.024.537
			2.07.06.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	Jumlah Perusahaan Yang Diperiksa Pelaksanaan Norma Kerjanya Di Pulau Lombok	Perusahaan	110	121.527.256,62	115	133.679.982
			2.07.06.1.01.02	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BID. WAS]	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya	Perusahaan	75	121.049.752,50	80	133.154.728
			2.07.06.1.01.02	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	35	83.069.401,69	40	91.376.342

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			2.07.06.1.01.03	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma K3-nya	Perusahaan	90	132.903.584,93	95	146.193.943
			2.07.06.1.01.03	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	120	87.676.643,10	125	96.444.307
			2.07.06.1.01.03	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Lombok	Orang	500	576.269.519,59	550	633.896.472

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
Terwujudnya pengelolaan Kawasan transmigrasi yang optimal	Meningkatnya pembangunan dan kemandirian masyarakat transmigrasi	Cakupan pengelolaan Kawasan transmigrasi (Satuan Kawasan Permukiman)				%	75		75	
		Persentase kemandirian masyarakat				%	100,00	258.937.946,94	100,00	284.831.742,00
		3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	persentase Kawasan Baru Transmigrasi		%	100	103.979.641,41	100	114.377.606
		3.32.02.1.01	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan	Jumlah Dokumen NKSAD.	Dokumen		1	103.979.641,41	1	114.377.606

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
				<b>Transmigrasi</b>						
			3.32.02.1.01.02	Sub Kegiatan Advokasi Dan Musyawarah Penetapan Kawasan [BID. TRANS]	Jumlah Dokumen NKSAD.	Dokumen	1	50.000.000,00	1	55.000.000
			3.32.02.1.01.03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen penyiapan tanah untuk kawasan transmigrasi	Dokumen	1	53.979.641,41	1	59.377.606
			<b>3.32.03</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>persentase kawasan transmigrasi yang dibangun</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>94.134.760,08</b>	<b>100</b>	<b>103.548.236</b>
			<b>3.32.02</b>	<b>Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah</b>	<b>Jumlah transmigran yang ditempatkan dalam 1 provinsi</b>	<b>KK</b>	<b>20</b>	<b>94.134.760,08</b>	<b>25</b>	<b>103.548.236</b>

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
				<b>Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>						
				Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan dalam 1 provinsi	KK	20	94.134.760,08	25	103.548.236
			<b>3.32.04</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>Cakupan kawasan transmigrasi yang dikembangkan</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>60.823.545,45</b>	<b>75</b>	<b>66.905.900</b>
			3.32.04.1.01	<b>Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pematapan</b>	<b>Jumlah peserta Bimtek</b>	orang	<b>20</b>	<b>60.823.545,45</b>	<b>25</b>	<b>66.905.900</b>



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kode	Program, Kegiatan, SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/SubKegiatan (Output)	Sat.	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Target	Rp.	Target	Rp.
			3.32.04.1.01.02	Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan satuan pemukiman. [BID. TRANS]	Jumlah peserta Bimtek	Orang	20	60.823.545,45	25	66.905.900
								<b>30.343.022.348,01</b>		<b>33.377.324.585,93</b>

---

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana kerja (Renja) Disnakertrans Prov. NTB ini merupakan tindak lanjut dari perubahan Renstra Disnakertrans Prov. NTB (2019-2023). Hal tersebut mutlak dilakukan guna menghadapi tantangan dan permasalahan yang berkembang saat ini seperti terjadinya pandemi *Covid-19*, disamping juga untuk menyesuaikan rencana strategis SKPD dengan regulasi yang terbaru.

Tujuan utama dari Penyusunan Renja Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2023 adalah sebagai dokumen acuan tahunan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan. Beberapa isu-isu strategis yang menjadi tantangan Disnakertrans Prov. NTB kedepan antara lain: Masih tingginya pengangguran terbuka, jumlah PHK yang meningkat, persaingan tenaga kerja lokal dengan luar daerah dan luar negeri yang semakin meningkat, kapasitas BLK/LLK yang masih rendah, peran perangkat HI yang masih minim, dan penempatan transmigran yang masih belum optimal.

Kinerja Disnakertrans Prov. NTB yang terkait dengan kinerja kepala daerah dalam RPJMD ada dua yaitu tingkat pengangguran terbuka dan cakupan penempatan transmigrasi. Jika melihat indikator kinerja, Disnakertrans bisa dikatakan berhasil dalam mencapai target. Walaupun begitu, tantangan kedepan jauh lebih berat karena akibat dari pandemi *Covid-19* yang berdampak di semua sektor.